

PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN DALAM PEMBINAAN PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN KARIMUN (STUDI KASUS KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN)

¹Janesa Pragita.S, ²Kustiawan, ³Ardi Putra

^{1,2&3}Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email:

1janesapragita.s@gmail.com

2kustiawan@umrah.ac.id

3ardiputra@umrah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam pembinaan promosi dan pemasaran produk IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun Kecamatan Karimun. Produk IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun tidak bisa bertahan lama apabila tidak dibantu oleh pemerintah, karena sebagian besar usaha IKM (Industri Kecil Menengah) menghasilkan barang-barang konsumsi yang tidak mampu bertahan lama dan mereka mempunyai keterbatasan sumber daya dimana produknya tidak bisa menjangkau segmen pasar lebih luas. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Gede Diva, Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai regulator, dan pemerintah sebagai katalisator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya menganalisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta saran. Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian di Kabupaten Karimun sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan dalam sektor ekonomi, karena peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi yang lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan menjadi tiga macam bentuk peran yaitu, peran pemerintah sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator. Fasilitator berperan dalam penyediaan sarana, prasarana dan pembinaan maupun pelatihan, Regulator berperan mengatur kebijakan untuk pemulihan ekonomi, Katalisator berperan untuk mengenalkan para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) kepada pihak ketiga atau dunia perbankan, dalam mengakses pinjaman modal untuk para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah).

Kata Kunci: Peran; Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian; Pembinaan; IKM; Kabupaten Karimun.

Abstract

This Research was conducted to determine the extent of the role of the department of manpower and industry in the development of promotion and marketing of SME (Small and Medium Enterprises) products in Karimun Regency, specifically in Karimun District. SMEs in Karimun Regency cannot sustain themselves without government assistance, as most of these enterprises produce consumer goods that have a limited shelf life, and they have resource limitations that prevent their products from reaching a wider market segment. Additionally, among the SME operators, there are those who do not meet the necessary requirements to market their products. The theory used in this study is Gede Diva's theory, Government as facilitator, government as regulator, and government as catalyst. The research methodology used in this study was a qualitative descriptive, where data was collected through using sighting, debriefing, and documentation. The collected data has been analyzed through by data abatement and presentment, inference, and reference. The investigation found that role of the government, particularly the Department of Manpower and Industry in Karimun Regency, is crucial for the development and growth of the economic sector. The government's role and support are

instrumental in formulating policies for initial steps to be taken in order to enhance economic development. In this research, the author categorized the government's role into three forms: facilitator, regulator, and catalyst. The regulator is responsible for policy-making related to economic recovery, while the catalyst introduces SME operators to third parties or the banking sector, facilitating access to capital loans for SME operators.

Keywords: Role; Department of Manpower and Industry; Development; SME; Karimun Regency.

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan sekarang Indonesia masih disebut sebagai negara berkembang bukan negara maju. Hal ini terlihat dari banyaknya pengangguran di Indonesia dan rendahnya tingkat kekayaan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat menciptakan lapangan kerja. Kesempatan kerja seperti itu seringkali diciptakan melalui pembukaan perusahaan industri. Skala industri yang akan dibuat tidak harus besar, bisa skala kecil atau menengah. Saat ini usaha Industri Kecil Menengah (IKM) lebih banyak diminati karena tidak membutuhkan modal yang banyak dan tidak memiliki banyak pesaing, selain itu juga lebih mudah dan sederhana dalam menjalankan usaha Industri Kecil Menengah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. Undang-undang mengatur pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif yang memberikan peluang usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga meningkatkan status, peran, dan potensi usahanya. Peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Zidan, 2021).

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu pilar perekonomian nasional, industri kecil dan menengah menjadi salah satu sumber pendapatan nasional melalui pajak yang mereka bayarkan, karena pelaku industri kecil dan menengah memiliki rumah tangga industri dan niaga perseorangan serta memiliki sumber daya manusia yang cukup (Budi, 2013). Tidak hanya negara, usaha kecil dan menengah juga berperan dalam meningkatkan

pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wilayah geografis yang strategis keunikan dan keistimewaan Pulau Karimun menjadikan lokasinya begitu strategis karena dapat dijadikan pintu gerbang masuknya investasi asing, barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selain itu mampu menjadi hubungan bagi pengembangan industri kaya teknologi yang dapat membawa keuntungan di masa depan dan pengembangan industri bernilai tambah yang tinggi. Dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah, serta keberadaan masyarakat yang mendukung, Kabupaten Karimun memiliki potensi dan peluang yang besar untuk mengutamakan industri sebagai penopang perekonomian. Di Kabupaten Karimun sendiri memiliki 12 Kecamatan yaitu Karimun, Tebing, Kundur, Meral, Kundur Utara, Belat, Moro, Kundur Barat, Meral Barat, Buru, Durai, dan Ungar. Di antara 12 kecamatan ini salah satu Kecamatannya yaitu Kecamatan Karimun, pada tahun 2020 Kecamatan Karimun memiliki jumlah pelaku usaha Industri Kecil Menengah sebanyak 79 pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah), dan

pada tahun 2021 sebanyak 90 pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah).

Operasional industri tidak selalu berjalan dengan mulus, para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya para pelaku usaha masih minim sekali dengan kepiawaian teknologi, dan IKM (Industri Kecil Menengah) masih belum memenuhi syarat untuk mempromosikan produk mereka, seperti halnya masih banyak para pelaku IKM yang belum memiliki sertifikat halal, NIB, dan P-IRT. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) masih banyak yang tidak memahami akan teknologi yang saat ini berkembang mengingat hampir rata-rata para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) adalah orang tua yang masih kurang mengerti akan teknologi, lalu permasalahan yang terjadi lainnya pada saat pemasaran produk para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) harus memiliki sertifikat halal, P-IRT dalam hal ini banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, P-IRT selain itu pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) juga kekurangan informasi mengenai wajib memiliki sertifikat halal hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh

pemerintah daerah atas hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka. Maka dari itu perlu peran pemerintah serta pengawasan terhadap pelaku IKM (Industri Kecil Menengah), yang mana seharusnya pemerintah daerah, atau dinas yang memegang kendali akan hal tersebut selalu giat melakukan program-program untuk para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) agar para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) paham bagaimana menjadi pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) yang baik seiring dengan perkembangan zaman. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) tersebut maka diperlukan peran penting dari pemerintah. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri kecil. Peran pemerintah adalah menjaga iklim investasi dan bisnis yang menguntungkan, untuk itu pemerintah perlu menyusun undang-undang dan kebijakan yang mencakup berbagai aspek strategis, antara lain izin usaha, promosi, kemitraan, peluang usaha, dukungan

kelembagaan dan lainnya (Abraham, 2016). Adapun yang berperan penting dalam menjaga kestabilan dan perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) adalah pemerintah daerah. Pemerintah Daerah (local authorities) adalah pejabat daerah berdasarkan undang-undang (statutory corporations) yang dibentuk secara berjenjang untuk menjalankan ragam luas fungsi daerah yang telah ditetapkan undang-undang (Parpworth, 2021). Yang dalam hal ini yang berperan menjaga kestabilan dan perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) merupakan tugas dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

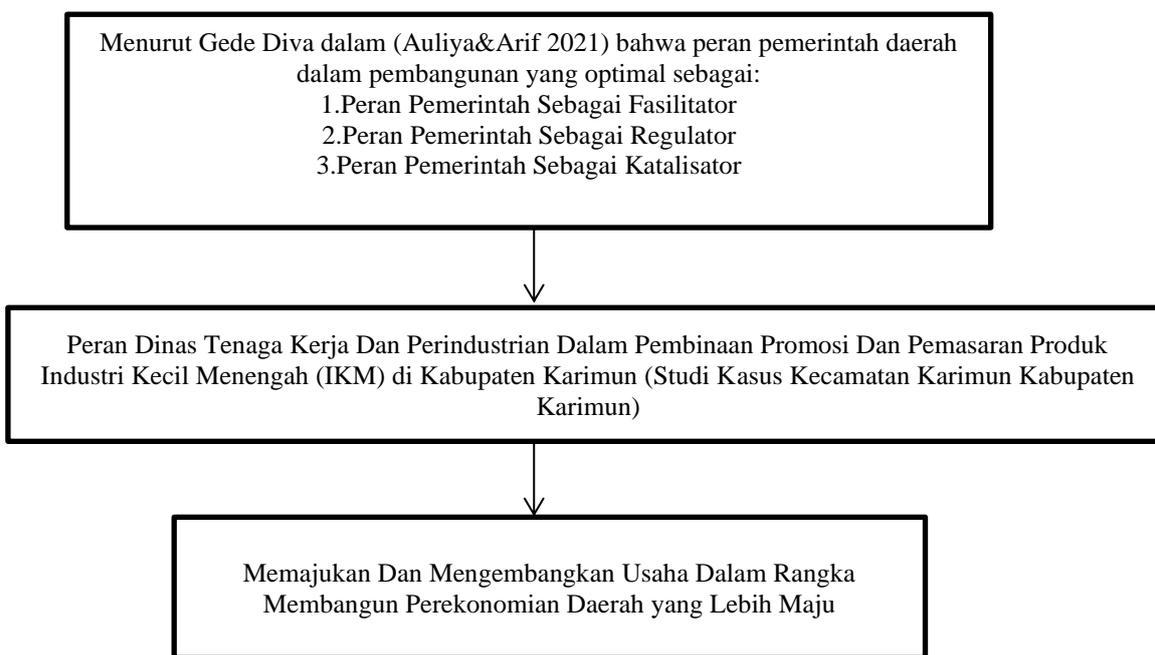
METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan hasil wawancara ilmiah dan segala sesuatu yang ada di lapangan dalam kaitannya dengan yang terjadi sekarang dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam pembinaan promosi dan pemasaran produk Industri Kecil Menengah (IKM) di

Kabupaten Karimun Kecamatan Karimun. dokumentasi. Analisis data ini Dalam pengumpulan data penulis diperkenalkan oleh Gede Diva yang melakukan wawancara dengan pelaku melihat empat aspek utama. Aspek utama industri kecil menengah Tanjung Balai tersebut dalam dilihat pada grafik yang Karimun Kecamatan Karimun dan disajikan di bawah ini.

Gambar 1.

Kerangka Pemikiran Gede Diva Peran Pemerintah (Gede Diva dalam Auliya&Arif2021)



Sumber: Olahan Data Peneliti

Dalam membantu penelitian ini membantu IKM (Industri Kecil digunakan Teori Peran Pemerintah Menengah) mencapai tujuan sebagai Fasilitator, Regulator, dan pengembangan usahanya melalui katalisator. Penelitian ini akan di analisis pemberian fasilitas, Pendampingan, berdasarkan indikator-indikator dalam pelatihan, dan memberikan sosialisasi peran pemerintah berdasarkan Teori untuk menumbuhkan dan meningkatkan Gede Diva Sebagai berikut: Peran kemampuan daya saing para pelaku IKM Pemerintah Sebagai Fasilitator, Sebagai (Industri Kecil Menengah), Peran Fasilitator Dinas Tenaga Kerja Dan Pemerintah Sebagai Regulator, Peran Perindustrian, memiliki peran dalam Pemerintah sebagai Regulator yang

merupakan pihak pembuat peraturan atau kebijakan dengan tujuan memberikan acuan sesuai undang-undang yang ada dan mengatur jalannya pembangunan serta kemajuan para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah). Jika kebijakan tersebut diterapkan dengan baik dan berjalan dengan lancar maka hasilnya akan berjalan sesuai dengan tujuannya, Peran Pemerintah Sebagai Katalisator, Peran Pemerintah sebagai Katalisator adalah pertama mengenai produksi dan pengolahan, pemerintah mencoba untuk membantu pengrajin atau pelaku usaha dengan menambah modal melalui kerjasama dengan pihak ketiga agar para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan akses pinjaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan sektor ekonomi, karena adanya peran dan dukungan pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang merupakan strategi awal yang dapat digunakan untuk sebuah pembangunan dalam sebuah sektor ekonomi. Semua kegiatan bisa berjalan di karenakan ada campur tangan dari pemerintah yang mengatur, mengawasi,

dan mengambil keputusan untuk berbagai persoalan yang terjadi dan bisa mempercepat pergerakan dalam sektor ekonomi dengan kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan informasi mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Karimun. Dalam hal ini peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian sangat penting dalam membantu usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar lebih maju dan berkembang. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun sendiri secara fokus memberdayakan atau membina IKM yang bernaung dibawahnya dengan berbagai program yang dilakukan sebagai sarana dalam mewujudkan usaha yang kompetitif dan unggul. Tetapi di samping itu perlu di ketahui bahwa di samping peran pemerintah tersebut juga terdapat peran dari para pelaku usaha itu sendiri.

Peran Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah adalah pemerintah

daerah dan majelis rakyat setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atas dasar otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. Yang mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan dan pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun Kecamatan Karimun. Instansi yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang berperan penting dalam kemajuan dan pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun.

Menurut Ndraha, 2003: 75-76 (dalam Suryani, 2022) menyebutkan tiga fungsi pemerintah yaitu, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Namun, jika dilihat dari pendekatan produk, ada dua macam fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah.

Sedangkan Menurut Gede Diva (dalam Abigail, 2018) dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator:

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi IKM (Industri Kecil Menengah) untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh IKM (Industri Kecil Menengah).

b. Peran pemerintah sebagai regulator adalah mengambil langkah-langkah untuk membantu pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menjaga lingkungan bisnis yang menguntungkan.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator secara harfiah katalisator adalah suatu reaksi untuk mempercepat. Berdasarkan hal tersebut, posisi pemerintah daerah adalah sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dalam hal terkait pengembangan IKM di Kabupaten Karimun.

Dalam rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian pada tahun 2020, penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah melaksanakan fungsi sebagai perumusan

kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian Kabupaten Karimun yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupten Karimun telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, antara lain:

- a. Meningkatkan tenaga kerja lokal yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja.
- b. Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK.
- d. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pelaku IKM.
- e. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip goodgovernance di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Industri Kecil Menengah (IKM)

Industri dalam arti adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk serupa atau menggunakan bahan baku serupa dalam proses pembuatannya. Dalam arti yang lebih luas, industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang banyak diminati. Menurut Sudharma (1990), industri adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Proses industri khususnya usaha kecil dan menengah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia akan sangat membantu meningkatkan nilai tambah perekonomian. Jika ada tambahan pendapatan, hal ini akan berpengaruh pada perbaikan perekonomian nasional (Bakhri, 2020).

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria sebagai usaha kecil (Astuti, Miguna & Matondang, 2020). Menurut Abdurachmat & Maryani (1997:27) (dalam M. Sari, 2021) Industri merupakan

salah satu kegiatan ekonomi manusia yang penting, industri dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup manusia mulai dari makanan, minuman, pakaian dan perlengkapannya rumah tangga sampai perumahan dan kebutuhan hidup lainnya.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sebagai Fasilitator, Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian berperan dalam membantu Industri Kecil Menengah mencapai tujuan pengembangan usahanya melalui pemberian fasilitas, bimbingan, Pendampingan, dan bantuan lainnya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing IKM. Penelitian ini menguraikan beberapa peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian khususnya di bidang perindustrian sebagai fasilitator untuk pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan agar dapat mencapai target yang diinginkan. Fasilitas Sarana dan Prasarana, Sarana adalah sesuatu yang bisa dipergunakan sebagai alat agar tercapai apa yang menjadi tujuan, sedangkan prasarana adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat serta bahan dalam mencapai apa yang menjadi maksud serta tujuan dari proses produksi tersebut. Sarana dan Prasarana merupakan beberapa faktor yang yang

mendukung dalam keberhasilan suatu pekerjaan. Sarana dan prasarana ialah sebuah alat pendukung yang digunakan selama kegiatan pengembangan, adanya sarana dan prasarana yang sangat lengkap juga menunjang kelancaran kegiatan yang dijalankan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala kelengkapan dan fasilitas seperti tempat kegiatan yang nyaman, pelaksana yang berkualitas, peralatan yang lengkap dan memadai sehingga dapat membuat peserta merasa nyaman dan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. Selanjutnya didalam fasilitator ada Pelatihan dan Bimbingan Keterampilan, Pelatihan menjadi peran dan strategi dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian di Kabupaten Karimun dalam melakukan pengembangan Usaha Industri Kecil Menengah (IKM). Pelatihan merupakan kegiatan organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan sebagian sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat mempergunakannya dalam pengembangan usaha mereka. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian telah melakukan pelatihan kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) seperti

pelatihan pelaksanaan pemberdayaan aneka industri bagi industri kecil dan menengah, pelatihan menjahit, dan bimbingan teknis SINNAS (sistem informasi industri nasional) bagi pelaku usaha Industri di Kabupaten Karimun. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya permasalahan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki, selanjutnya ada Pemasaran, Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa ternyata sangat tergantung pada kemampuan bangsa itu untuk mengembangkan sistem distribusi yang efektif, pemasaran adalah jalan keluar untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, praktik-praktik pemasaran mempunyai dampak yang besar terhadap manusia dalam peranannya sebagai pembeli, penjual dan warga masyarakat (Melati, 2021). Setelah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian, maka hal yang selanjutnya harus dilakukan oleh para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) adalah dengan memasarkan produknya, Para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) harus melakukan pemasaran produk dengan baik sehingga dapat menarik minat pembeli. Dengan adanya

kemajuan teknologi, para pelaku IKM bisa memanfaatkan teknologi tersebut sebagai pengganti pasar dengan melakukan pemasaran secara online melalui media sosial. Pemasaran tidak hanya terjadi di lapangan saja melainkan bisa melalui media social serta pameran produk yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Regulator adalah kebijakan, yang mana pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan atau menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembanguna (Firdaus, 2020). Dalam hal ini pihak yang membuat peraturan atau kebijakan adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian khususnya di bidang perindustrian Kabupaten Karimun dengan tujuan memberikan acuan sesuai dengan undanag-undang yang ada. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri

2. Melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan evaluasi Industri Kecil Menengah
3. Merumuskan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri
4. Melaksanakan monitoring industri besar
5. Pembinaan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan promosi dan pemasaran produksi industri
7. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan kreatifitas dan inovasi sumber daya industri
8. Merumuskan pelaksanaan dan evaluasi rekomendasi perizinan industri
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk kelancaraan tugas pembinaan, dan pengembangan industri
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di tugaskan oleh atasan.

Industri Kecil Menengah memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga IKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan daerah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan

dengan IKM dari sisi produksi, akan mengacu peranan IKM dalam perekonomian. Hasilnya dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu dari pandangan pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari pandangan pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan di perlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Akan tetapi jika suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena dengan adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidak sesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan.

Melihat keadaan yang sekarang jauh berubah dari keadaan sebelumnya, yang mana sebelumnya teknologi tidak berkembang seperti sekarang ini, hal ini membuat para pelaku usaha yang hampir rata-rata para pelaku Industri Kecil Menengah adalah orang tua yang kurang mengerti akan pengetahuan tentang teknologi atau bahkan tidak mengerti sama sekali bagaimana cara penggunaannya, sekarang ini memang perlu adanya peran maupun strategi dari

pemerintah untuk membuat program atau kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut, tetapi ini semua bukan sepenuhnya kewenangan mereka, dinas tenaga kerja dan perindustrian tidak bisa mengeluarkan kebijakan, mereka hanya bisa mengikuti aturan yang telah ada sesuai dengan tugas fungsi dan tugas pokok yang sudah ada di dinas tenaga kerja dan perindustrian, seperti halnya yang terdapat pada undang-undang no 3 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 43 ayat (1) yang mana daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inivasi masyarakat dalam pembangunan industri. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dinas tenaga kerja dan perindustrian mengenai memfasilitasi para pelaku usaha industri kecil menengah.

Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah (Firdaus, 2020). Anggaran merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tanpa adanya anggaran maka sudah dapat dipastikan setiap kegiatan yang sudah direncanakan tidak akan dapat

dilaksanakan. Disini dibutuhkan peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian sebagai katalisator yang mencari tempat untuk para pelaku IKM dapat mendapatkan anggaran atau modal mereka dengan sangat rendah.

Kendala Dan Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam pembinaan promosi dan pemasaran produk IKM di Kabupaten Karimun. Dalam melaksanakan pengembangan Indutsri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Karimun, Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian masih memiliki beberapa kendala. Kendala- kendala tersebut diantaranya adalah :

a. Pelaku IKM belum optimal menggunakan teknologi dalam memasarkan produknya.

Dalam hal ini pelaku usaha Industri Kecil Menengah menghadapi tantangan pasar yang semakin ketat di masa mendatang karena para pesaing lainnya akan terus melakukan perubahan dengan melakukan promosi produk yang bersifat online, sedangkan para pelaku Industri Kecil Menengah khususnya di kecataman karimun Kabupaten Karimun banyak pelaku usaha yang sudah berumur yang kurang memahai perkembangan teknologi yang ada saat ini.

b. Seringnya pelaku IKM tidak mengikuti pelatihan yang diadakan Selain kendala pelaku IKM tidak optimal dalam menggunakan teknologi dalam hal memasarkan produknya, kendala lainnya yaitu dalam mengatur peran nya sebagai fasilitator selain pelaku IKM masih jarang mengikuti pelatihan yang diadakan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dan pelatihan masih dibatasi, yang mengikuti pelatihan hanya beberapa orang saja yang mendapatkan kuota pelatihan tersebut dikarenakan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada jadi sistem pelatihannya bertahap sesuai dengan kuota yang di sediakan.

Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian telah melakukan berbagai upaya dalam mempromosikan produk IKM di Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, yaitu dengan melakukan kegiatan pameran, dan memberikan fasilitas berupa gerai yang di berikan dari pemda yang mana lokasinya bertepatan di kecamatan karimun, di gerai ini berisikan segala hasil produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha Industri Kecil Menengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas tentang peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam

pembinaan promosi dan pemasaran produk IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun (Studi kasus Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun) dapat di ambil kesimpulan berdasarkan indikator yang digunakan sebagai berikut:

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian selalu mengedepankan fasilitas yang terbaik bagi para pelaku usaha seperti memberikan tempat kegiatan yang nyaman, memberikan pelaksanaan yang berkualitas, peralatan yang memadai sehingga dapat membuat peserta merasa nyaman dan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, Pelatihan dan Bimbingan Keterampilan

Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam meningkatkan program pelatihan dan bimbingan keterampilan sudah berjalan optimal, hal ini dapat dilihat dengan adanya program pelatihan, dan pembinaan yang dijalankan setiap setahun sekali sesuai dengan Renja yang ada, Pemasaran, Pemasaran dalam suatu usaha merupakan peran yang sangat penting

dalam rangka memasarkan produk dan mengenalkan produk untuk meningkatkan penjualan. Pemasaran yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, strategi ini dijalankan agar dapat memberikan suatu produk dengan kualitas yang baik dan berdaya saing.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator, Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian berperan sebagai Regulator yang merupakan pihak pembuat peraturan atau kebijakan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dengan tujuan memberikan acuan sesuai undang-undang yang ada dan mengatur jalannya pembangunan serta pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah). Jika kebijakan tersebut diterapkan dengan baik dan berjalan lancar maka hasilnya akan berjalan sesuai dengan tujuannya.

Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Upaya pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai katalisator adalah mencoba untuk membantu pelaku usaha dengan memperkenalkan dunia perbankan melalui kerjasama dengan pihak ketiga agar para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan pinjaman modal.

REFENSI

- Abraham, S. (2016). Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Industri Kecil di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. In *e-journal Ilmu Pemerintahan: Vol. 4* (3).
- Astuti, Miguna & Matondang, N. (2020). *Manajemen Pemasaran: UMKM dan Digital Media* (R. H. M. Meutia (Ed.)). DeePublish.
- Auliya & Arif. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro di Kabupaten Gresik. *Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*, 8 (1).
- Bakhri, S. (2020). *Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah)* (D. Angraeni (Ed.)). K.Media.
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*, 3 No.1.
- Melati. (2021). *Manajemen Pemasaran* (A. Y. Wati (Ed.)). DeePublish.
- Parpworth, N. H. & N. (2021). *Pemerintah Daerah*. Nusamedia.
- Sari, M. (2021). *Upaya Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Dalam Memberikan*

- Pelayanan Terhadap Industri Kecil Menengah. Skripsi. Sriwijaya.
- Suryani, U. (2022). Peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2020-2021. Skripsi. Maritim Raja Ali Haji.
- Zidan, A. (2021). Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Mempromosikan Produk Industri Kecil Menengah di Kota Jambi. Skripsi. Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.